

BAB II  
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi

2.1.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

2.1.a. Sekretaris Daerah membawahkan:

- 1). Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
  - a). Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama membawahkan:
    - (1). Bagian Pemerintahan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - (b). Sub Bagian Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Pertanahan;
      - (c). Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
      - (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (2). Bagian Otonomi Daerah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Urusan Pemerintahan Dan Standar Pelayanan Minimal;
      - (b). Sub Bagian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dan Peningkatan Kapasitas Daerah; dan
      - (c). Sub Bagian Fasilitasi Kepala Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
    - (3). Bagian Kerja sama, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Kerja sama Dalam Negeri;
      - (b). Sub Bagian Kerja sama Luar Negeri; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.
  - b). Biro Hukum, membawahkan:
    - (1). Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
      - (b). Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Gubernur; dan
      - (c). Sub Bagian Pengkajian Dan Sosialisasi Produk Hukum.
    - (2). Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Sengketa Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
      - (b). Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (3). Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;

- (b). Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
  - (c). Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum.
- c). Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
- (1). Bagian Keagamaan, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pelayanan Kehidupan Beragama;
    - (b). Sub Bagian Sarana Pendidikan Keagamaan; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - (2). Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan Dan Perpustakaan;
    - (b). Sub Bagian Kesehatan; dan
    - (c). Sub Bagian Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi.
  - (3). Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan Dan Olah Raga, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
    - (b). Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil; dan
    - (c). Sub Bagian Kepemudaan Dan Olah Raga.
- 2). Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahkan:
- a). Biro Perekonomian, membawahkan:
    - (1). Bagian Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Perindustrian Dan Perdagangan;
      - (b). Sub Bagian Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
    - (2). Bagian Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Keuangan; dan
      - (b). Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah bidang Jasa Dan Produksi.
    - (3). Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Perhubungan; dan
      - (b). Sub Bagian Penanaman Modal Dan Pariwisata.
  - b). Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
    - (1). Bagian Infrastruktur, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang;
      - (b). Sub Bagian Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (2). Bagian Lingkungan Hidup, Kehutanan Dan Energi Sumber Daya Mineral, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
    - (b). Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.
  - (3). Bagian Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan Dan Pertanian, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Ketahanan Pangan;
    - (b). Sub Bagian Kelautan Dan Perikanan; dan
    - (c). Sub Bagian Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan.
- c). Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
- (1). Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan ;
    - (b). Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - (c). Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - (2). Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - (b). Sub Bagian Pengelolaan LPSE; dan
  - (3). Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - (b). Sub Bagian Advokasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- 3). Asisten Administrasi, membawahkan:
- a). Biro Organisasi, membawahkan:
    - (1). Bagian Kelembagaan, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
      - (b). Sub Bagian Pembinaan Dan Pengawasan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
      - (c). Sub Bagian Analisis Dan Formasi Jabatan; dan
      - (d). Sub Bagian Tata Usaha Asisten Administrasi.
    - (2). Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik, membawahkan:
      - (a). Sub Bagian Tatalaksana;
      - (b). Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
      - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.

- (3). Bagian Akuntabilitas Kinerja Dan Reformasi Birokrasi, membawahkan:
  - (a). Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
  - (b). Sub Bagian Reformasi Birokrasi; dan
  - (c). Sub Bagian Kepegawaian.
- b). Biro Umum, membawahkan:
  - (1). Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Sarana Dan Prasarana;
    - (b). Sub Bagian Pelayanan Rumah Tangga;
    - (c). Sub Bagian Keuangan; dan
    - (d). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - (2). Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Liputan Dan Dokumentasi;
    - (b). Sub Bagian Publikasi Dan Hubungan Media; dan
    - (c). Sub Bagian Protokol.
  - (3). Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Gubernur;
    - (b). Sub Bagian Tata Usaha Dan Rumah Tangga Wakil Gubernur;
    - (c). Sub Bagian Materi Naskah Pimpinan; dan
    - (d). Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Daerah.
- c). Biro Administrasi Pembangunan Daerah, membawahkan :
  - (1). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintahan, Sosial Dan Budaya;
    - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi; dan
    - (c). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur.
  - (2). Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
    - (b). Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
    - (c). Sub Bagian Tata Usaha Biro.
  - (3). Bagian Pelaporan Dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan:
    - (a). Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

(b). Sub Bagian Analisis Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan

(c). Sub Bagian Penyusunan Program.

#### 2.1.2. Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Perangkat Gubernur serta pelayanan administratif.

#### 2.1.3. Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

#### 2.1.3.a. Tugas dan Fungsi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama

##### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya.

##### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama; dan

- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

#### 2.1.3.b. Tugas dan Fungsi Biro Hukum

##### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum.

##### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### 2.1.3.c. Tugas dan Fungsi Biro Kesejahteraan Rakyat

#### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga.

#### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah Raga;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang keagamaan, Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, dan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olah raga; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

### 2.1.3.d. Tugas dan Fungsi Biro Perekonomian

#### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya

ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta perhubungan, penanaman modal dan pariwisata.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah Badan Usaha Milik Daerah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Badan Usaha Milik Daerah dan Perangkat Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- c. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- d. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
- e. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perindustrian, perdagangan, dan koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal dan pariwisata;
- f. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya manusia badan usaha milik daerah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

2.1.3.e. Tugas dan Fungsi Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

(1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

(2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;



- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- c. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang infrastruktur dan sumber daya alam;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

#### 2.1.3.f. Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

##### (1). Tugas

Menyusun pengekoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang administrasi Pengadaan barang/jasa.

##### (2). Fungsi

- a. Pengekoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan Barang/jasa, pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- c. Membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi Pengadaan barang/jasa;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan Pengadaan barang/Jasa, pengelolaan Sistem Pengadaan barang/Jasa, dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan Pengadaan barang/jasa, pengelolaan sistem Pengadaan barang/jasa dan pembinaan dan advokasi Pengadaan barang/jasa; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.1.3.g. Tugas dan Fungsi Biro Organisasi

##### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi.

##### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

#### 2.1.3.h. Tugas dan Fungsi Biro Umum

##### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan.

##### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- d. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Sekretariat Daerah, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### 2.1.3.i. Tugas dan Fungsi Biro Administrasi Pembangunan Daerah

##### (1). Tugas

Melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Perangkat Gubernur sebagai pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan.

##### (2). Fungsi

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Administrasi Pembangunan Daerah;

- e. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan dan analisis pelaksanaan pembangunan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

## 2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan didukung sumberdaya antara lain:

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 562 Pegawai Negeri Sipil ( data PNS per oktober 2018), terdiri dari Eselon I.b 1 orang, Eselon II.a 2 orang, Eselon II.b 8 orang, Eselon III.a sebanyak 22 orang dan Eselon IV.a sebanyak 68 orang serta JFU 461 orang. Berdasarkan golongan, maka PNS Sekretariat Daerah terdiri dari golongan I sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 96 orang, golongan III sebanyak 387 orang dan golongan IV sebanyak 74 orang yang rata-rata mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen.

Secara rinci data PNS pada per Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan Januari Tahun 2018

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN							GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML
1	Sekretaris Daerah	1		1						1	1				1	1				1
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	0		0						0										
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1		1						1					1		1			1
4	Asisten Administrasi	1		1						1					1		1			1
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	24	30	54	0	1	5	0	27	21		0	3	40	11	0	1	3	8	12
6	Biro Hukum	27	15	42	1	0	3	3	21	14		0	2	31	9	0	1	3	9	13
7	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	11	27	38	1	0	4	1	18	14		0	1	30	7	0	1	2	9	12
8	Biro Perekonomian	26	16	42	0	0	6	2	20	14		0	4	28	10	0	1	3	6	10
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	23	42	1	0	5	3	15	17		0	2	31	9	0	1	3	7	11
10	Biro Kesra	24	22	46	0	0	1	2	28	15		0	2	37	9	0	1	3	8	11

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN			PENDIDIKAN							GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	JML	SD	SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III	IV	JML
11	Biro Organisasi	29	25	54	0	0	6	2	24	18		0	2	39	13	0	1	3	10	14
12	Biro Umum	151	91	243	13	20	97	15	84	13		8	80	151	3	0	1	2	11	14
13	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)																			
JUMLAH		313	249	562		21	127	28	237	128	1	8	96	387	74	1	10	22	68	97

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Penunjang

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Setda Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

No.	KODE bidang BARANG	NAMA bidang BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	01.01	TANAH	18
2	02.02	ALAT-ALAT BESAR	39
3	02.03	ALAT-ALAT ANGKUT	327
4	02.04	ALAT-ALAT BENGKEL	2
5	02.05	ALAT-ALAT PERTANIAN	-
6	02.06	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	19.268
7	02.07	ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	2.057
8	02.08	ALAT KEDOKTERAN	46
9	02.09	ALAT LABORATORIUM	-
10	02.10	ALAT KEAMANAN	10
11	03.11	BANGUNAN GEDUNG	44
12	03.12	BANGUNAN MONUMEN	-
13	04.13	JALAN DAN JEMBATAN	-
14	04.14	BANGUNAN AIR IRIGASI	-
15	04.15	INSTALASI	58
16	04.16	JARINGAN	-
17	05.17	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	14.084
18	05.18	BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN	73
19	05.19	HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN	-
20	06.11	BANGUNAN GEDUNG	-
21	06.12	BANGUNAN MONUMEN	-

Sumber : Biro Umum Setda Prov. Jateng, 31 Desember 2017

### 2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan OPD merupakan capaian kinerja OPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis 2013-2018 sebagaimana table berikut:



TABEL 2.1.

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan																			
	a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Disusun (dokumen perda)				17	7	10	12	15	17	7	10	12	15	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Hukum
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum																			
	a. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Bersertifikasi ISO (unit)				22 UPP	25 UPP	27 UPP	31	34	22 UPP	25 UPP	27 UPP	31	34	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker; Biro Adm. Bangsa; Biro ISDA;
	b. Jumlah UPP yang Dilakukan Pengukuran IKM (unit)				12 UPP	16 UPP	20 UPP	43	28	12 UPP	16 UPP	20 UPP	43	28	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Perekonomian; Biro Kesra;

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	c. Perapatan Pilar Batas (pilar)				50 Pilar	100 pilar	50 Pilar	50	50	50 Pilar	100 pilar	50 Pilar	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Organisasi; Biro Umum.
	d. Perawatan Pilar Batas (pilar)				0	135	0	80	80	0	135	0	80	80		100%		100%	100%	
	e. Pengendalian Kinerja SKPD/OPD				48 SKPD	48	48	48	48	48 SKPD	48	48	48	48	100%	100%	100%	100%	100%	
	f. Penyusunan LKPJ (dokumen)				1 Dok LKPJ	1 dok LKPJ	1	1	1	1 Dok LKPJ	1 dok LKPJ	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	
	g. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota				3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Prov, 35 Kab/Kota	Prov, 35 Kab/Kota	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Prov, 35 Kab/Kota	Prov, 35 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
3.	Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
	a. Laporan LPPD Provinsi (laporan)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker
	b. Pemetaan Kapasitas Pemerintahan				5	10	5	7	7	5	10	5	7	7	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-					OPD Penanggung Jawab
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Daerah Kabupaten/Kota (kab/kota)																			
	c. Desk Pilkada				3	21	7	7 Kab/Kota	1 Provinsi, 7 Kab/Kota	3	21	7	7 Kab/Kota	1 Provinsi, 7 Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah																			
	a. Negara, MoU dan Perjanjian Teknis (PT)				4 MoU, 4 Kegiatan	9	5	2 negara, 5 PT	4 MoU, 8 Negara, 15 PT	4 MoU, 4 Kegiatan	9	5	2 negara, 5 PT	4 MoU, 8 Negara, 15 PT	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pemotdaker
	b. Naskah Kerjasama (NK)				79	154	51	50	182 NK	79	154	51	50	182 NK	100%	100%	100%	100%	100%	

TABEL 2.2.

## ANGGARAN DAN REALIASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BIRO BANGDA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	150.000.000	100.000.000	40.000.000	30.000.000	40.000.000	119.117.950	95.287.000	37.257.422	30.000.000	39.834.900	79,41	95,29	93,14	100	99,59	-21%	-27%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	450.000.000	400.000.000	372.500.000	439.750.000	450.000.000	373.307.515	384.873.836	350.492.624	390.884.055	446.717.547	82,96	96,22	94,09	88,89	99,27	1%	-11%
3	Kegiatan Pengendalian Bantuan Pembangunan Wilayah	900.000.000	900.000.000	753.827.000	750.000.000	850.000.000	877.246.101	882.231.166	738.305.300	730.982.603	838.599.295	97,47	98,03	97,94	97,46	98,66	-1%	-14%
4	Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	691.500.000	658.000.000	800.000.000	967.601.600	816.012.569	666.614.962	614.039.166	791.799.500	96,76	81,60	96,40	93,32	98,97	-4%	-20%
5	Kegiatan Pelaporan, Analisis Pelaksanaan Pembangunan	650.000.000	625.000.000	578.535.000	565.000.000	670.000.000	641.716.550	618.384.550	561.492.840	528.069.500	667.361.750	98,73	98,94	97,05	93,46	99,61	0%	-12%
6	Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Tengah	1.000.000.000	943.000.000	692.250.000	720.000.000	835.000.000	962.728.300	859.413.650	686.974.000	687.804.750	814.964.850	96,27	91,14	99,24	95,53	97,60	-5%	-18%
7	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK di Provinsi Jawa tengah	375.000.000	250.000.000	193.125.000	220.000.000	300.000.000	363.702.956	246.832.476	182.820.850	211.680.250	285.876.180	96,99	98,73	94,66	96,22	95,29	-1%	-29%
8	Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di	300.000.000	300.000.000	135.923.000	66.000.000	0	277.565.800	193.117.000	131.910.960	54.029.600	0	92,52	64,37	97,05	81,86	0	-35%	-40%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hukum	100.000.000	150.000.000	25.000.000	47.500.000	85.000.000	100.000.000	150.000.000	24.843.500	47.500.000	85.000.000	100,00	100,00	99,37	100,00	100	29%	11%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah Biro Hukum	300.000.000	350.000.000	300.000.000	285.000.000	305.000.000	289.758.700	348.409.500	298.104.050	285.000.000	305.000.000	96,59	99,55	99,37	100,00	100	-2%	-8%
3	Kegiatan Sosialisasi Produk-produk Hukum Terkait Dengan Pemerintah Daerah Dan Pemerintah Pusat	600.000.000	600.000.000	405.000.000	0	0	599.937.200	596.415.552	401.253.000	0	0	99,99	99,40	99,07	-	-	-16%	-17%
4	Kegiatan Penyusunan/Revisi Peraturan Daerah	1.300.000.000	1.310.000.000	1.411.111.000	1.448.750.000	1.870.000.000	1.299.674.100	1.303.018.000	1.410.610.000	1.444.705.500	1.870.000.000	99,97	99,47	99,96	99,72	100	7%	-2%
5	Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	900.000.000	825.000.000	1.011.111.000	783.750.000	1.050.000.000	897.400.000	803.977.200	941.998.100	769.745.800	1.049.500.000	99,71	97,45	93,16	98,21	99,95	5%	-11%
6	Kegiatan Lomba Kadarkum Ormas Tingkat Provinsi Jawa Tengah.	250.000.000	266.000.000	379.310.000	0	0	247.395.000	258.321.800	365.623.900	0	0	98,96	97,11	96,39	-	-	24%	23%
7	Kegiatan Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	602.450.000	368.000.000	349.024.000	332.500.000	0	570.902.000	366.442.300	342.979.850	331.181.500	0	94,76	99,58	98,27	99,60	-	-16%	-15%
8	Kegiatan Koordinasi, Konsultasi Dan Advokasi Hukum	650.000.000	590.000.000	241.880.000	878.750.000	0	650.000.000	590.000.000	235.248.500	875.500.000	0	100,00	100,00	97,26	99,63	-	65%	68%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Produksi	150.000.000	125.000.000	113.068.000	71.250.000	200.000.000	150.000.000	125.000.000	113.000.000	71.250.000	194.800.000	100,00	100,00	99,94	100,00	97,40	29%	-1%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Produksi	350.000.000	620.000.000	600.000.000	366.937.000	700.000.000	349.930.960	574.957.848	587.802.588	360.396.200	650.898.225	99,98	92,74	97,97	98,22	92,99	31%	-2%
3	Kegiatan Koordinasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	275.000.000	250.000.000	274.330.000	190.000.000	0	274.996.450	247.160.000	272.650.850	163.551.150	0	100,00	98,86	99,39	86,08	-	-10%	-13%
4	Kegiatan Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Air yang Berkelanjutan dan Konservasi Air	250.000.000	217.000.000	187.500.000	1.898.500.000	0	249.519.000	202.224.000	182.326.000	1.635.546.606	0	99,81	93,19	97,24	86,15	-	295%	256%
5	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	100.000.000	170.000.000	0	0	0	100.000.000	162.715.000	0	0	0	100,00	95,71	-	-	-	70%	63%
6	Kegiatan koordinasi pembinaan perikanan tangkap sumberdaya kelautan	100.000.000	100.000.000	200.000.000	150.000.000	0	100.000.000	92.780.000	165.121.900	132.088.392	0	100,00	92,78	82,56	88,06	-	25%	17%
7	Kegiatan koordinasi pembinaan peningkatan produksi perikanan	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	0	99.275.000	98.000.000	134.915.000	129.602.065	0	99,28	98,00	89,94	86,40	-	17%	11%
8	Kegiatan Koordinasi Pengendalian dan	200.000.000	170.000.000	625.000.000	516.500.000	0	199.000.000	166.735.000	572.013.699	499.606.330	0	99,50	98,08	91,52	96,73	-	78%	71%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pengawasan Sarana Produksi																	
9	Kegiatan Penyelenggaraan SAE	100.000.000	1.500.000.000	100.000.000	1.031.000.000	0	100.000.000	1.457.143.000	73.101.000	946.468.200	0	100,00	97,14	73,10	91,80	-	746%	819%
10	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian.	500.000.000	0	0	0	0	499.300.000	0	0	0	0	99,86	-	-	-	-	-	-
11	Kegiatan koordinasi bantuan pangan dan dana talangan.	1.400.000.000	0	0	0	0	1.397.262.000	0	0	0	0	99,80	-	-	-	-	-	-
12	Kegiatan koordinasi pembinaan kelembagaan pertanian	1.900.000.000	580.555.000	266.720.000	800.000.000	0	1.898.110.000	568.808.800	182.934.100	783.735.800	0	99,90	97,98	68,59	97,97	-	25%	64%
13	koordinasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	200.000.000	200.000.000	253.575.000	190.000.000	0	199.990.000	190.552.300	222.281.918	173.671.100	0	100,00	95,28	87,66	91,41	-	1%	-3%
14	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan kehutanan dan Pelestarian Sumberdaya Hutan.	400.000.000	0	0	261.250.000	0	398.395.200	0	0	253.473.330	0	99,60	-	-	97,02	-	-	-
15	Kegiatan Pengelolaan Pertambangan Kabupaten/Kota dengan Provinsi;	150.000.000	0	187.500.000	0	0	150.000.000	0	185.807.000	0	0	100,00	-	99,10	--	-	-	-
16	Kegiatan koordinasi pengembangan energi daerah dan energi pedesaan	175.000.000	182.000.000	0	0	0	175.000.000	170.112.200	0	0	0	100,00	93,47	-	-	-	4%	-3%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Hemat Energi dan Air	175.000.000	138.000.000	0	0	0	175.000.000	131.300.000	0	0	0	100,00	95,14	-	-	-	-21%	-25%
18	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Agrobisnis Pertanian	0	210.000.000	569.600.000	250.000.000	0	0	202.188.500	473.684.672	247.215.676	0	-	96,28	83,16	98,89	-	58%	43%
19	Kegiatan koordinasi Pengadaan Cadangan pangan dan dana talangan.	0	1.000.000.000	0	0	0	0	992.939.872	0	0	0	-	99,29	-	-	-	-	0%
20	Kegiatan Koordinasi Pembangunan Kehutanan dan Pelestarian Sumber Daya Hutan	0	449.445.000	333.457.000	0	0	0	431.253.825	325.513.190	0	0	-	95,95	97,62	-	-	-26%	-25%
21	Kegiatan Koordinasi pengelolaan pertambangan Kab/Kota dengan Provinsi	0	285.000.000	0	165.000.000	0	0	270.726.800	0	157.576.000	0	-	94,99	-	95,50	-	-	0%
22	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Energi Baru Terbarukan	0	228.000.000	135.630.000	148.500.000	0	0	206.370.727	134.730.000	144.511.300	0	-	90,51	99,34	97,31	-	-16%	-14%
23	Kegiatan Koordinasi Bidang Energi	0	0	278.620.000	165.000.000	0	0	0	278.167.000	157.180.050	0	-	-	99,84	95,26	-	-41%	-43%
24	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan Ketahanan Pangan	0	0	0	0	400.000.000	0	0	0	0	392.367.450	-	-	-	-	98,09	-	-
25	Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan dan Pembangunan	0	0	0	0	350.000.000	0	0	0	0	337.628.289	-	-	-	-	96,47	-	-



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental - (Bina Mental)	170.000.000	200.000.000	120.000.000			159.000.000	150.000.000	115.300.100			93,53	75,00	96,08			-11%	-14%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Mental - (Bina Mental)	375.000.000	550.000.000	440.381.000			369.883.658	531.152.262	411.819.676			98,64	96,57	93,51			13%	11%
3	Kegiatan Pengembangan Akses Jangkauan Pelayanan Pendidikan	1.525.000.000	1.536.000.000				1.307.194.300	1.359.953.400				85,72	88,54				1%	4%
4	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikdas)	350.000.000	325.000.000				350.000.000	214.167.000				100,00	65,90				-7%	-39%
5	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Guru Keagamaan (Dikmen)	300.000.000	275.000.000				299.865.000	186.962.000				99,96	67,99				-8%	-38%
6	Pembinaan dan penyuluhan P4GN bagi tokoh agama dan masyarakat	250.000.000	285.000.000				206.071.000	206.204.920				82,43	72,35				14%	0%
7	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	515.000.000	1.285.000.000				473.121.107	1.245.177.850				91,87	96,90				150%	163%
8	Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Hibah Kegamaan	507.000.000	422.500.000	1.792.595.000			415.131.590	339.213.248	1.614.725.150			81,88	80,29	90,08			154%	179%
9	Kegiatan Koordinasi Pengembangan	250.000.000	240.575.000				241.878.600	230.317.500	-			96,75	95,74				-4%	-5%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Keolahragaan																	
10	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	2.300.000.000	2.300.000.000	1.358.180.000			1.090.638.120	1.429.591.752	1.257.079.200			47,42	62,16	92,56			-20%	10%
11	Koordinasi Pengembangan Kepemudaan	250.000.000	779.450.000				209.358.400	259.393.400				83,74	33,28				212%	24%
12	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	350.000.000	307.295.000				254.594.500	283.856.700				72,74	92,37				-12%	11%
13	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya	750.000.000	876.000.000	693.425.000			673.406.025	829.868.750	689.756.250			89,79	94,73	99,47			-2%	3%
14	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan			1.267.800.000					1.124.846.443					88,72			-	-
15	Kegiatan Koordinasi P4GN			246.369.000					246.364.750					100,00			-	-
BIRO BINA SOSIAL																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Sosial - (Bina Sosial)	75.000.000	125.000.000	60.000.000			75.000.000	124.123.350	60.000.000			100,00	99,30	100,00			7%	7%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Sosial - (Bina Sosial)	300.000.000	400.000.000	287.771.000			299.792.950	380.984.763	285.374.200			99,93	95,25	99,17			3%	1%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	Kegiatan Peningkatan koordinasi penanggulangan penyakit menular	275.000.000	285.000.000	177.532.000			270.918.250	270.748.700	175.574.550			98,52	95,00	98,90			-17%	-18%
4	Kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) Tingkat Jawa Tengah.	133.000.000	190.000.000	144.900.000			129.135.200	177.525.800	143.833.000			97,09	93,43	99,26			10%	9%
5	Kegiatan Fasilitasi peningkatan, kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	250.000.000	300.000.000	221.577.000			244.028.150	273.958.700	215.582.250			97,61	91,32	97,29			-3%	-5%
6	Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Pada Kelompok Lansia	200.000.000	300.000.000	185.211.000			191.947.700	257.671.500	185.203.750			95,97	85,89	100,00			6%	3%
7	Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi P4GN	225.000.000	300.000.000	249.500.000			220.583.500	246.213.500	249.447.750			98,04	82,07	99,98			8%	6%
8	Kegiatan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Fasilitasi Penanganan TKI Bermasalah, Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ketenagakerjaan	200.000.000	1.170.000.000	823.028.000			198.919.400	859.073.820	419.987.253			99,46	73,43	51,03			228%	140%
9	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Trafficking Terhadap Perempuan	150.000.000					136.315.000					90,88					-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	dan Anak Sewilayah MPU (Mitra Praja Utama)																	
10	Kegiatan Peningkatan peran serta anak dalam pembangunan	225.000.000	225.000.000	112.542.000			221.189.600	187.085.001	106.940.000			98,31	83,15	95,02			-25%	-29%
11	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	300.000.000	280.000.000	691.335.000			289.177.000	263.099.046	684.690.000			96,39	93,96	99,04			70%	76%
12	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan penanganan kemiskinan	200.000.000	200.000.000	176.875.000			195.791.800	162.415.900	170.407.000			97,90	81,21	96,34			-6%	-6%
13	Kegiatan Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat	200.000.000	190.000.000	63.750.000			197.011.300	175.148.600	63.547.500			98,51	92,18	99,68			-36%	-37%
14	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	249.000.000	230.000.000	199.980.000			191.310.000	192.956.442	181.747.084			76,83	83,89	90,88			-10%	-2%
15	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	124.500.000	125.000.000	83.596.000			120.104.700	103.670.500	82.318.500			96,47	82,94	98,47			-16%	-17%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Kegiatan Pembinaan dan monitoring yayasan, lembaga dan kelompok sosial lainnya	500.000.000	375.000.000				481.781.000	352.623.600				96,36	94,03				-25%	-27%
17	Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	150.000.000	375.000.000				148.884.500	334.104.050				99,26	89,09				150%	124%
18	Kegiatan Sinergitas, Koordinasi, Fasilitasi pemantauan lapangan dan pemantauan pemberian bantuan bencana	250.000.000					246.376.200					98,55					-	-
19	Kegiatan koordinasi bidang ketransmigrasian	100.000.000	80.000.000	76.972.000			95.573.620	79.113.300	72.247.999			95,57	98,89	93,86			-12%	-13%
20	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking		150.000.000	69.873.000				143.845.569	69.672.955				95,90	99,71			-53%	-52%
21	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialiasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta			278.363.000					277.542.328					99,71			-	-



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial																	
22	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana			259.695.000					249.936.880					96,24			-	-
BIRO KESRA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Bina Mental	0	0	0	140.000.000	150.000.000	0	0	0	117.473.640	149.832.000	-	-	-	83,91	99,89	7%	-33%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Bina Mental	0	0	0	305.400.000	400.000.000	0	0	0	282.337.234	258.468.597	-	-	-	92,45	64,62	31%	-52%
3	Kegiatan pengembangan kesenian dan nilai budaya				654.000.000	1.340.000.00				618.623.300	1.305.325.440				94,59	97,41	105%	-6%
4	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Bidang Pendidikan Keagamaan	0	0	0	907.000.000	1.300.000.00	0	0	0	848.767.900	1.166.197.146	-	-	-	93,58	89,71	10%	-32%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5	Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanggulangan Penyakit	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0	192.699.300	194.497.100	-	-	-	96,35	97,25	0%	-45%
6	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anti Narkoba	0	0	0	85.000.000	0	0	0	0	79.792.750	0	-	-	-	93,87	-	-100%	-100%
7	Koordinasi peningkatan kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan	0	0	0	161.500.000	200.000.000	0	0	0	156.326.366	195.929.650	-	-	-	96,80	97,96	24%	-40%
8	Koordinasi peningkatan kesehatan pada kelompok lansia	0	0	0	123.500.000	150.000.000	0	0	0	114.446.000	147.619.800	-	-	-	92,67	98,41	21%	-43%
9	Kegiatan Koordinasi P4GN	0	0	0	316.350.000	325.000.000	0	0	0	238.203.596	319.387.900	-	-	-	75,30	98,27	3%	-22%
10	Kegiatan Pelayanan Kehidupan Beragama	0	0	0	8.480.000.00 0	3.000.000.00 0	0	0	0	7.500.167.30 9	2.664.925.300	-	-	-	88,45	88,83	-76%	-86%
11	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Yayasan, Lembaga dan Kelompok Masyarakat Lainnya serta Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Sosial	0	0	0	209.000.000	215.000.000	0	0	0	189.448.700	201.298.332	-	-	-	90,65	93,63	3%	-22%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
12	Kegiatan Koordinasi, Sinergitas, Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana serta Pemantauan Lapangan dan Pemberian Bantuan Bencana	0	0	0	209.000.000	215.000.000	0	0	0	166.001.980	179.805.200	-	-	-	79,43	83,63	3%	-29%
13	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penanganan TKI Bermasalah dan Bidang Ketenagakerjaan	0	0	0	498.500.000	215.000.000	0	0	0	225.449.900	200.098.350	-	-	-	45,23	93,07	-57%	-54%
14	Koordinasi, Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Penanganan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak serta Trafficking	0	0	0	115.000.000	140.000.000	0	0	0	107.087.550	130.554.761	-	-	-	93,12	93,25	22%	-30%
15	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan	0	0	0	123.000.000	150.000.000	0	0	0	114.365.550	143.684.189	-	-	-	92,98	95,79	22%	-75%
16	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungannya	0	0	0	190.000.000	220.000.000	0	0	0	154.377.000	189.562.500	-	-	-	81,25	86,16	16%	-32%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Koordinasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Secara Sinergis Melalui TKSK	0	0	0	110.000.000	200.000.000	0	0	0	97.436.100	172.762.250	-	-	-	88,58	86,38	82%	-79%
18	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Kemiskinan	0	0	0	71.000.000	131.000.000	0	0	0	69.210.000	125.649.300	-	-	-	97,48	95,92	85%	53%
19	Peningkatan Koordinasi Pelayanan Keluarga Berencana (KB)	0	0	0	285.000.000	250.000.000	0	0	0	259.194.300	247.827.350	-	-	-	90,95	99,13	-12%	-57%
20	Kegiatan Pengembangan Sinergitas dan Evaluasi Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	346.000.000	500.000.000	0	0	0	340.311.000	494.641.000	-	-	-	98,36	98,93	45%	-34%
21	Kegiatan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan dan Peribadatan	0	0	0	1.462.000.000	1.750.000.000	0	0	0	1.427.987.200	1.738.391.280	-	-	-	97,67	99,34	20%	-31%
22	Kegiatan Koordinasi Kerjasama Bidang Pendidikan	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	0	142.351.900	-	-	-	-	94,90	-	-
23	Kegiatan koordinasi bidang ketransmigrasian	0	0	0	0	215.000.000	0	0	0	0	169.321.940	-	-	-	-	78,75	-	-
BIRO ORGANISASI																		
1	Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Tulis	75.000.000	100.000.000	85.893.000	64.660.000	93.750.000	75.000.000	100.000.000	85.891.000	64.365.900	92.703.150	100,00	100,00	100,00	99,55	98,88	10%	-4%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kantor Biro Organisasi dan Kepegawaian																	
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Biro Organisasi dan Kepegawaian	350.000.000	750.000.000	418.750.000	216.360.000	320.000.000	305.233.200	519.947.000	404.256.000	211.945.651	294.352.789	87,21	69,33	96,54	97,96	91,99	15%	-2%
3	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	1.618.800.000 0	1.488.950.000 0	937.500.000	482.197.000	850.000.000	1.486.763.000 0	1.242.957.400 0	935.982.720	481.614.950	807.259.950	91,84	83,48	99,84	99,88	94,97	-2%	-30%
4	Kegiatan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	550.000.000	635.800.000	300.000.000	206.647.000	450.000.000	550.000.000	559.166.000	299.803.800	199.769.000	442.773.505	100,00	87,95	99,93	96,67	98,39	6%	-26%
5	Kegiatan Pelaksanaan Analisis Jabatan Perangkat Daerah	1.828.450.000 0	785.000.000	525.000.000	516.640.000	700.000.000	1.826.634.000 0	784.910.000	482.981.629	503.379.800	690.453.240	99,90	99,99	92,00	97,43	98,64	-14%	-30%
6	Kegiatan Penilaian Kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota	415.000.000	482.020.000	311.446.000	304.950.000	400.000.000	412.083.300	448.390.500	309.511.400	302.195.200	318.137.700	99,30	93,02	99,38	99,10	79,53	2%	-8%
7	Kegiatan Pendampingan Penerapan SMM dan Sertifikasi ISO 9001:2008	498.000.000	529.800.000	281.000.000	285.000.000	655.100.000	497.525.200	506.277.000	277.129.300	283.260.400	588.866.700	99,90	95,56	98,62	99,39	89,89	31%	-2%
8	Kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	290.500.000	344.700.000	372.500.000	316.350.000	450.000.000	290.319.800	329.745.700	315.605.896	315.460.950	353.478.350	99,94	95,66	84,73	99,72	78,55	13%	-18%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pemprov. Jateng																	
9	Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	806.680.000	550.000.000	0	378.860.000	800.000.000	760.363.100	366.922.400	0	368.316.000	796.337.950	94,26	66,71	-	97,22	99,54	40%	-48%
10	Kegiatan Konsolidasi Kelembagaan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah	500.000.000	624.625.000	265.000.000	247.950.000	0	493.756.300	447.042.850	258.336.149	238.920.783	0	98,75	71,57	97,49	96,36	-	-13%	-20%
11	Kegiatan Implementasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah	348.600.000	416.000.000	300.000.000	361.710.000	390.000.000	348.562.500	384.709.914	276.330.500	339.196.100	356.810.968	99,99	92,48	92,11	93,78	91,49	5%	-11%
12	Kegiatan Penyusunan Pedoman Ketatalaksanaan	239.638.000	270.760.000	121.886.000	168.150.000	0	238.554.300	253.279.000	120.805.600	166.841.450	0	99,55	93,54	99,11	99,22	-	-1%	-3%
13	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang Ketatalaksanaan	216.862.000	241.120.000	191.073.000	178.125.000	500.000.000	205.787.600	226.907.000	190.766.100	175.002.900	486.749.500	94,89	94,11	99,84	98,25	97,35	41%	7%
14	Kegiatan Evaluasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah	500.000.000	601.200.000	250.000.000	172.212.000	0	499.399.900	435.506.200	249.585.000	170.180.100	0	99,88	72,44	99,83	98,82	-	-23%	-29%
15	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Analis Jabatan	178.750.000	268.425.000	236.089.000	185.930.000	0	177.310.000	125.747.200	232.454.450	180.913.459	0	99,19	46,85	98,46	97,30	-	6%	11%
16	Kegiatan Penyusunan Pola Hubungan Kerja	166.000.000	93.500.000	99.390.000	56.514.000	0	161.509.900	84.022.000	98.286.100	56.514.000	0	97,30	89,86	98,89	100,00	-	-27%	-25%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Pengembangan Budaya Kerja	355.500.000	511.500.000	293.500.000	344.375.000	300.000.000	355.425.200	303.767.100	293.459.100	308.074.700	75.258.376	99,98	59,39	99,99	89,46	25,09	1%	-22%
18	Kegiatan Koordinasi Pengembangan SAKIP Pemerintah Kabupaten/Kota	279.000.000	330.000.000	274.250.000	293.788.000	0	271.739.200	302.166.116	272.888.400	248.504.000	0	97,40	91,57	99,50	84,59	-	3%	-2%
19	Kegiatan Sistem Manajemen Informasi Organisasi	350.000.000	476.960.000	201.038.000	245.195.000	200.000.000	349.407.100	192.139.650	195.572.972	192.402.700	86.733.750	99,83	40,28	97,28	78,47	43,37	-5%	-25%
20	Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Permenpan No. 60 / 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	230.000.000	225.000.000	147.000.000	137.750.000	0	221.245.000	217.652.000	103.537.000	103.109.100	0	96,19	96,73	70,43	74,85	-	-14%	-18%
21	Kegiatan Pengelolaan SIMPEG Setda Prov. Jateng	150.000.000	125.000.000	185.580.000	174.334.000	0	149.450.000	118.364.000	183.216.500	172.312.950	0	99,63	94,69	98,73	98,84	-	9%	9%
22	Kegiatan Sosialisasi Program Bapertarum-PNS	250.000.000	195.000.000	126.725.000	0	0	249.203.000	120.784.300	125.783.400	0	0	99,68	61,94	99,26	-	-	-29%	-24%
23	Kegiatan Peningkatan Disiplin PNS Setda Prov. Jateng	425.000.000	290.000.000	178.200.000	130.910.000	125.000.000	222.627.000	249.928.000	174.948.400	127.234.422	120.491.000	52,38	86,18	98,18	97,19	96,39	-25%	-27%
24	Kegiatan Fasilitas Kesejahteraan PNS Pemprov. Jateng	402.750.000	0	0	0	0	402.564.000	0	0	0	0	99,95	-	-	-	-	-	-
26	Fasilitasi dan penilaian kinerja Pem	0	0	295.680.000	0	0	0	0	289.564.100	0	0	-	-	97,93	-	-	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kab/Kota																	
28	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal					200.000.000					157.396.250					78,70	-	-
29	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	180.918.375	-	-	-	-	90,46	-	-
30	Kegiatan pengembangan ketatalaksanaan	0	0	0	0	395.000.000	0	0	0	0	384.772.125	-	-	-	-	97,41	-	-
31	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	197.212.500	-	-	-	-	98,61	-	-
32	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Setda Prov. Jateng	0	0	0	0	200.000.000	0	0	0	0	194.185.700	-	-	-	-	97,09	-	-
BIRO TATA PEMERINTAHAN																		
1	Kegiatan Pembinaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	290.500.000	275.000.000	187.130.000			283.584.000	261.194.300	185.234.350			97,62	94,98	98,99			-19%	-18%
2	Kegiatan Koordinasi Penanganan Permasalahan dan Penyelenggaraan Urusan Pertanahan sebagai Kewenangan	300.000.000	283.000.000	169.500.000			299.173.000	276.373.650	168.048.600			99,72	97,66	99,14			-23%	-23%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Provinsi																	
3	Kegiatan Identifikasi Tanah HP (Hak Pakai) Aset Pemprov Jateng dan Pemetaan Tematik Tanah HGU & Sosialisasi Pengelolaan HGU	350.000.000	329.620.000	235.500.000			349.781.000	291.780.000	235.500.000			99,94	88,52	100,00			-17%	-18%
4	Kegiatan Penyelesaian Alih Fungsi Tanah Kas Desa & Penyusunan data tata guna tanah kas desa	400.000.000	282.460.000	167.500.000			399.316.400	281.050.200	166.150.000			99,83	99,50	99,19			-35%	-35%
5	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa di Kab. se Jawa Tengah	400.000.000	388.000.000	290.000.000			399.720.300	385.088.400	289.882.600			99,93	99,25	99,96			-14%	-14%
6	Fasilitasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	350.000.000	329.700.000	205.000.000			347.375.000	301.868.700	205.000.000			99,25	91,56	100,00			-22%	-23%
7	Kegiatan Koordinasi Tramtib Terpadu	275.000.000	732.750.000	518.000.000			272.000.000	689.369.200	513.333.100			98,91	94,08	99,10			69%	64%
8	Sinergitas Penanganan Ketertiban Lintas Lembaga dan Masyarakat	475.000.000					474.886.500					99,98					-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	175.000.000	381.790.000	145.176.000			174.372.500	316.279.000	144.516.900			99,64	82,84	99,55			28%	14%
10	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	520.050.000	977.475.000	527.875.000			508.714.900	773.953.400	514.698.860			97,82	79,18	97,50			21%	9%
11	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	225.000.000	377.200.000	193.698.000			224.160.806	315.207.410	189.263.450			99,63	83,57	97,71			9%	0%
12	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	200.000.000	285.000.000	244.620.000			196.145.780	251.159.744	223.500.445			98,07	88,13	91,37			14%	9%
13	Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	200.000.000	150.000.000	93.750.000			198.037.800	128.263.100	86.233.930			99,02	85,51	91,98			-31%	-34%
14	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	275.000.000	295.610.000	150.000.000			268.833.400	290.400.200	147.624.100			97,76	98,24	98,42			-21%	-21%
15	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	250.000.000	216.160.000	131.250.000			242.185.700	149.056.700	107.908.150			96,87	68,96	82,22			-26%	-33%
16	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	285.000.000	381.144.000	527.564.000			284.199.200	336.893.310	522.287.000			99,72	88,39	99,00			36%	37%
17	Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan di	175.000.000	200.058.000	112.500.000			170.396.700	96.331.500	94.636.400			97,37	48,15	84,12			-15%	-23%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Daerah																	
18	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Tata Pemerintahan	75.000.000	85.000.000	56.250.000			75.000.000	85.000.000	56.250.000			100,00	100,00	100,00			-10%	-10%
19	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan Luar Daerah Biro Tata Pemerintahan	300.000.000	350.000.000	188.437.000			298.646.058	285.192.810	169.267.934			99,55	81,48	89,83			-15%	-23%
BIRO OTONOMI DAERAH & KERJASAMA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	100.000.000	200.000.000	150.000.000		122.000.000	100.000.000	199.997.600	150.000.000		108.468.000	100,00	100,00	100,00		88,91	38%	37%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	300.000.000	600.000.000	625.000.000		605.000.000	298.400.708	554.824.289	624.978.705		587.974.305	99,47	92,47	100,00		97,19	52%	49%
3	Koordinasi percepatan pencapaian SPM	500.000.000	785.150.000	487.500.000		770.300.000	481.505.000	718.350.000	476.898.976		726.432.750	96,30	91,49	97,83		94,31	10%	8%
4	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	400.000.000	1.205.000.000	750.000.000		2.000.000.000	385.508.150	777.889.707	721.959.728		1.784.948.676	96,38	64,56	96,26		89,25	82%	47%
5	Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD	1.450.000.000	1.382.780.000	787.500.000		1.190.000.000	1.380.282.928	1.260.595.000	685.187.670		1.084.919.300	95,19	91,16	87,01		91,17	-24%	-27%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing	1.200.000.00 0	2.450.000.00 0	1.788.000.00 0		1.725.000.00 0	1.180.528.90 0	2.396.845.00 0	1.775.675.00 0		1.513.615.000	98,38	97,83	99,31		87,75	39%	39%
7	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	315.400.000	400.000.000	375.000.000	304.950.000	0	303.282.710	387.049.770	372.143.867	293.335.450	0	96,16	96,76	99,24	96,19	-	10%	12%
8	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah	604.000.000	786.470.000	615.300.000		565.000.000	593.188.000	771.800.000	588.805.750		525.258.600	98,21	98,13	95,69		92,97	4%	3%
9	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	1.055.000.00 0	900.000.000	1.912.500.00 0		1.600.000.00 0	750.358.910	819.357.148	1.777.902.814		1.219.190.200	71,12	91,04	92,96		76,2	49%	63%
10	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah dengan Luar Negeri.	1.530.000.00 0	2.810.400.00 0	1.349.000.00 0		0	743.948.020	2.339.032.168	554.512.977		0	48,62	83,23	41,11		-	16%	69%
11	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	672.200.000	755.000.000	566.250.000		0	658.190.660	710.236.885	507.963.270		0	97,92	94,07	89,71		-	-6%	-10%
12	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri		425.200.000	524.200.000		0		410.284.395	474.200.000		0		96,49	90,46		-	23%	16%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0	0	0	105.093.000	122.000.000	0	0	0	95.232.500	108.468.000	-	-	-	90,62	88,91	16%	-27%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	0	0	0	377.625.000	605.000.000	-	-	-	375.338.675	587.974.305	-	-	-	99,39	97,19	60%	-32%
3	Kegiatan Penyusunan Basis Data Rupabumi/Toponimi Jawa Tengah	0	0	0	95.000.000	225.000.000	0	0	0	92.781.600	223.324.900	-	-	-	97,66	99,26	84%	-17%
4	Kegiatan Koordinasi Penegasan Batas Daerah	0	0	0	494.000.000	600.000.000	0	0	0	491.283.100	596.886.280	-	-	-	99,45	99,48	11%	-64%
5	Kegiatan Koordinasi Tatakelola Penataan dan Pemetaan Wilayah	0	0	0	142.500.000	150.000.000	0	0	0	142.138.210	143.921.000	-	-	-	99,75	95,95	5%	-38%
6	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	0	0	0	190.000.000	390.000.000	0	0	0	162.807.931	333.744.038	-	-	-	85,69	38,27	105%	-8%
7	Kegiatan Penyusunan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	0	0	0	95.000.000	125.000.000	0	0	0	92.444.632	118.838.260	-	-	-	97,31	95,07	32%	-24%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8	Kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	0	0	0	166.250.000	0	0	0	0	115.557.922	0	-	-	-	69,51	-	-	-
9	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan	0	0	0	95.000.000	255.000.000	0	0	0	84.895.795	224.862.365	-	-	-	89,36	88,18	168%	31%
10	Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	0	0	0	266.000.000	0	0	0	0	206.174.267	0	-	-	-	77,51	-	-	-
11	Koordinasi percepatan pencapaian SPM	0	0	0	500.000.000	770.300.000	0	0	0	494.493.000	726.432.750	-	-	-	98,90	94,31	54%	-50%
12	Kegiatan Desk Pilkada Prov. Jawa Tengah.	0	0	0	759.050.000	2.000.000.000	0	0	0	746.889.300	1.784.948.676	-	-	-	98,40	89,25	163%	22%
13	Kegiatan Analisis dan Penyusunan LPPD dan Informasi LPPD	0	0	0	750.000.000	1.190.000.000	0	0	0	649.509.611	1.084.919.300	-	-	-	86,60	91,17	59%	4%
14	Kegiatan Peningkatan Kapasitas daerah dalam rangka peningkatan daya saing	0	0	0	1.600.000.000	1.725.000.000	0	0	0	1.410.078.700	1.513.615.000	-	-	-	88,13	87,75	8%	-90%
15	Kegiatan Implementasi Proses Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab/Kota	0	0	0	304.950.000	0	0	0	0	293.335.450	0	-	-	-	96,19	-	-	-
16	Kegiatan penyelenggaraan otonomi daerah yang bertumpu pada kapasitas daerah	0	0	0	500.000.000	565.000.000	0	0	0	458.596.900	525.258.600	-	-	-	91,72	92,97	13%	-58%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
17	Kegiatan Penyusunan LPPD/LKPJ AMJ Gubernur Tahun 2008-2013	0	0	0	299.900.000	1.100.000.000	0	0	0	233.226.600	1.043.600.000	-	-	-	77,77	94,87	267%	217%
18	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Dalam Negeri	0	0	0	501.600.000	0	0	0	0	501.471.479	0	-	-	-	99,97	-	-	-
19	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Dlam Negeri	0	0	0	553.750.000	0	0	0	0	552.336.227	0	-	-	-	99,74	-	-	-
20	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Pemerintah Luar Negeri	0	0	0	1.025.050.000	0	0	0	0	726.913.450	0	-	-	-	70,91	-	-	-
21	Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Lembaga Non Pemerintah Luar Negeri	0	0	0	442.700.000	0	0	0	0	400.918.535	0	-	-	-	90,56	-	-	-
22	Kegiatan Pemanjanaan Penyelenggaraan Trantib dan Pertanahan Terpadu	0	0	0	0	505.200.000	0	0	0	0	473.126.141	-	-	-	-	93,65	-	-
23	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	0	0	0	0	1.698.400.000	0	0	0	0	1.564.195.698	-	-	-	-	92,1	-	-

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
24	Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Luar Negeri	0	0	0	0	1.600.000.000	0	0	0	0	1.219.190.200	-	-	-	-	76,2	-	-
BIRO PEREKONOMIAN																		
1	Kegiatan Koordinasi Bidang Pariwisata Lintas Instansi dan Kab/Kota.	300.000.000	325.000.000	337.500.000	190.000.000	300.000.000	291.224.300	286.530.300	285.693.164	188.966.640	274.912.733	97,07	88,16	84,65	99,46	91,64	7%	-16%
2	Kegiatan Kerjasama Penanaman Modal	100.000.000	0	0	0	0	94.703.100	0	0	0	0	94,70	-	-	-	-	-	-
3	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi	500.000.000	700.000.000	450.000.000	0	0	448.126.900	582.426.640	419.754.782	0	0	89,63	83,20	93,28	-	-	2%	1%
4	Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	400.000.000	550.000.000	450.000.000	285.000.000	750.000.000	388.765.900	460.324.400	442.359.575	281.405.000	432.538.300	97,19	83,70	98,30	98,74	57,67	36%	8%
5	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	750.000.000	764.000.000	573.750.000	665.000.000	500.000.000	715.063.700	676.353.653	561.803.150	598.438.900	463.613.125	95,34	88,53	97,92	89,99	92,72	-2%	-5%
6	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Perekonomian	60.000.000	75.000.000	37.500.000	25.000.000	70.000.000	59.749.100	75.000.000	36.430.800	25.000.000	42.571.000	99,58	100,00	97,15	100,00	60,82	30%	3%
7	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Perekonomian	300.000.000	300.000.000	172.500.000	150.000.000	330.000.000	294.850.780	294.602.908	164.480.277	148.248.900	188.133.550	98,28	98,20	95,35	98,83	57,01	16%	-7%
8	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD	1.450.000.000	1.336.000.000	1.016.250.000	0	0	1.187.514.900	1.084.123.932	815.879.338	0	0	81,90	81,15	80,28	-	-	-16%	-17%



No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Kegiatan Koordinasi Pengembangan Koperasi dan UMKM	525.000.000	400.000.000	300.000.000	189.800.000	800.000.000	501.798.400	314.105.350	282.979.870	188.396.700	783.296.300	95,58	78,53	94,33	99,26	97,91	59%	41%
10	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Desa	200.000.000	250.000.000	225.000.000	142.000.000	850.000.000	198.194.200	249.628.450	221.282.200	141.860.400	628.863.800	99,10	99,85	98,35	99,90	73,98	119%	81%
11	Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pengumpulan Informasi IHT Cukai Ilegal	500.000.000	850.000.000	500.000.000	300.000.000	1.000.000.000	491.800.000	742.373.910	486.849.830	288.222.940	322.851.250	98,36	87,34	97,37	96,07	32,29	56%	-3%
13	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Keuangan	0	0	0	500.000.000	700.000.000	0	0	0	400.869.016	685.074.276	-	-	-	80,17	97,87	40%	-4%
14	Kegiatan Koordinasi Pembinaan BUMD Bidang Jasa Produksi	0	0	0	360.000.000	500.000.000	0	0	0	318.128.145	465.378.962	-	-	-	88,37	93,08	39%	-3%
15	Kegiatan Koordinasi Bidang Investasi	0	0	0	0	250.000.000	0	0	0	0	235.749.494	-	-	-	-	94,3	-	-
16	Kegiatan Koordinasi Bidang Perhubungan.	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	463.613.125	-	-	-	-	92,72	-	-
BIRO UMUM																		
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Hubungan Masyarakat	150.000.000	150.000.000	56.250.000	0	900.000.000	127.864.500	102.291.750	55.918.000	0	897.857.200	85,24	68,19	99,41	-	99,76	-31%	-33%
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan	450.000.000	450.000.000	375.000.000	0	3.790.000.000	447.277.645	449.751.000	374.597.500	0	3.192.588.604	99,40	99,94	99,89	-	84,24	-8%	-8%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Hubungan Masyarakat																	
3	Kegiatan Analisis Berita dan Pendapat Umum	465.000.000	400.035.000	316.500.000	0	0	404.093.805	359.748.030	277.577.500	0	0	86,90	89,93	87,70	-	-	-17%	-17%
4	Kegiatan Dialog Interaktif Mbangun Deso/Pidato/Siaran Langsung/Spot	2.292.379.000	1.980.933.000	1.502.000.000	0	0	1.879.795.000	1.473.252.600	1.177.963.400	0	0	82,00	74,37	78,43	-	-	-19%	-21%
5	Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Informasi	150.000.000	147.550.000	150.000.000	0	0	141.608.000	142.140.000	142.386.500	0	0	94,41	96,33	94,92	-	-	0%	0%
6	Kegiatan Pembuatan Buletin/ Majalah/ Tabloid	559.500.000	581.040.000	178.120.000	0	0	544.828.200	546.191.650	178.118.330	0	0	97,38	94,00	100,00	-	-	-33%	-34%
7	Kegiatan Dialog Pengelolaan Pendapat Umum di Jawa Tengah	105.000.000	101.295.000	112.500.000	0	0	88.799.400	95.935.000	102.183.000	0	0	84,57	94,71	90,83	-	-	4%	7%
8	Kegiatan Sosialisasi Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah	150.000.000	145.995.000	150.000.000	0	0	132.820.000	48.561.500	141.137.000	0	0	88,55	33,26	94,09	-	-	0%	64%
9	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi	5.045.504.000	4.025.477.000	2.415.500.000	0	0	4.141.927.500	2.758.574.180	2.238.494.200	0	0	82,09	68,53	92,67	-	-	-30%	-26%
10	Kegiatan rubrik sosialisasi pembangunan Jawa Tengah	188.000.000	483.920.000	0	0	0	178.783.500	347.660.800	0	0	0	95,10	71,84	-	-	-	157%	94%
11	Peliputan Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan	2.018.617.000	2.311.300.000	2.205.421.000	0	0	1.282.918.100	1.624.800.600	1.493.003.300	0	0	63,55	70,30	67,70	-	-	5%	9%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pembangunan Daerah																	
12	Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelola Perpustakaan	83.000.000	68.180.000	62.250.000	0	0	82.280.000	67.829.900	61.864.800	0	0	99,13	99,49	99,38	-	-	-13%	-13%
13	Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Sistem Informasi	500.000.000	549.890.000	561.230.000	0	0	493.130.000	474.069.500	487.101.700	0	0	98,63	86,21	86,79	-	-	6%	-1%
14	Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Kehumasan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	110.000.000	242.650.000	187.500.000	0	0	108.747.500	227.133.800	176.167.000	0	0	98,86	93,61	93,96	-	-	49%	43%
15	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	166.000.000	173.250.000	151.574.000	0	0	149.872.450	158.246.610	147.354.000	0	0	90,28	91,34	97,22	-	-	-4%	-1%
16	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	450.000.000	527.000.000	487.500.000	0	0	410.578.000	505.700.700	454.870.869	0	0	91,24	95,96	93,31	-	-	5%	7%
17	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	850.000.000	1.300.000.000	285.270.000	0	0	804.208.400	993.318.700	164.806.750	0	0	94,61	76,41	57,77	-	-	-13%	-30%
	Biro Umum																	
1	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Biro Umum	1.575.000.000	1.300.000.000	800.000.000	712.500.000	900.000.000	1.178.709.225	1.263.625.900	799.442.750	695.175.325	897.857.200	74,84	97,20	99,93	97,57	99,76	-10%	-21%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Biro Umum	5.610.000.000	5.395.000.000	4.325.000.000	2.034.419.000	3.790.000.000	4.941.570.955	4.272.633.194	3.822.834.378	1.976.939.162	3.192.588.604	88,09	79,20	88,39	97,17	84,24	2%	-29%
3	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya dan Harga	225.000.000	253.040.000	142.290.000	380.000.000	400.000.000	199.813.700	187.498.353	117.773.900	315.763.271	321.096.900	88,81	74,10	82,77	83,10	80,27	35%	14%
4	Kegiatan Penataan Inventarisasi Barang di Lingkungan Sekretraiat Daerah Prov. Jateng	125.000.000	0	0	0	0	95.819.200	0	0	0	0	76,66	-	-	-	-	0%	0%
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200.000.000	200.000.000	125.000.000	89.063.000	185.000.000	192.909.710	170.230.515	118.713.410	89.031.550	172.214.000	96,45	85,12	94,97	99,96	93,09	1%	-25%
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.769.108.000	7.840.000.000	6.600.000.000	6.431.500.000	6.500.000.000	6.334.676.590	6.428.080.244	6.015.337.034	5.995.056.680	5.535.029.757	81,54	81,99	91,14	93,21	85,15	-2%	-13%
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	2.137.500.000	1.700.000.000	915.000.000	671.250.000	1.185.000.000	1.360.700.000	928.920.200	697.928.000	590.680.000	1.145.772.000	63,66	54,64	76,28	88,00	96,69	-17%	-29%
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS	388.800.000	0	57.000.000	0	0	276.797.700	0	13.986.750	0	0	71,19	-	24,54	-	-	-	-
9	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	975.000.000	1.131.450.000	524.910.000	522.500.000	700.000.000	905.113.831	997.005.611	504.606.095	501.068.000	666.035.247	92,83	88,12	96,13	95,90	95,15	-1%	-24%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas	2.278.445.000	2.440.000.000	2.300.000.000	1.638.750.000	2.580.000.000	2.230.114.000	2.305.449.000	2.236.347.000	1.586.142.020	2.530.210.498	97,88	94,49	97,23	96,79	98,07	7%	-14%
11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	2.344.000.000	2.000.000.000	1.000.000.000	712.500.000	940.000.000	1.558.636.830	1.378.530.370	929.442.700	701.217.200	922.643.600	66,49	68,93	92,94	98,42	98,15	-20%	-32%
12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	470.431.000	488.165.000	300.000.000	213.750.000	300.000.000	470.409.600	451.186.800	299.852.500	213.750.000	297.515.300	100,00	92,43	99,95	100,00	99,17	-6%	-27%
13	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.134.024.000	1.000.000.000	400.000.000	213.750.000	400.000.000	1.066.275.692	933.115.880	392.582.700	210.640.000	391.500.696	94,03	93,31	98,15	98,55	97,88	-8%	-31%
14	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	220.000.000	220.000.000	75.000.000	173.437.000	200.000.000	206.639.000	204.939.000	74.416.500	95.771.100	91.475.000	93,93	93,15	99,22	55,22	45,74	20%	-22%
15	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	8.850.000.000	8.782.000.000	6.675.000.000	6.337.500.000	8.350.000.000	8.820.466.715	8.547.963.960	6.671.285.836	6.335.944.170	8.329.470.500	99,67	97,34	99,94	99,98	99,75	-7%	-19%
16	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	6.167.852.000	4.924.108.000	5.212.333.000	4.800.000.000	5.925.000.000	5.841.122.250	4.407.040.682	4.808.130.922	4.558.392.920	5.705.145.656	94,70	89,50	92,25	94,97	96,29	0%	-13%
17	Kegiatan Peningkatan Olah Raga dan Seni	2.663.200.000	1.466.300.000	587.000.000	399.000.000	930.000.000	1.626.501.100	1.199.164.850	489.014.700	357.650.700	845.056.000	61,07	81,78	83,31	89,64	90,87	-13%	-39%
18	Kegiatan Penyediaan Pelayanan Tamu	4.200.000.000	3.201.480.000	1.808.750.000	0	0	2.773.157.793	1.203.628.710	1.611.553.979	0	0	66,03	37,60	89,10	-	-	-34%	-11%
19	Kegiatan Penyediaan Sarana Kesehatan	499.980.000	500.000.000	100.000.000	0	0	499.969.460	496.376.651	99.890.680	0	0	100,00	99,28	99,89	-	-	-40%	-40%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
20	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.700.000.000	4.745.900.000	6.514.069.000		9.001.000.000	2.621.361.000	4.440.287.200	6.435.429.000		8.931.547.163	97,09	93,56	98,79		99,23	57%	57%
21	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	1.270.000.000	2.526.000.000	1.967.000.000	1.159.125.000	4.830.000.000	1.233.754.500	2.318.211.350	1.753.798.900	1.086.058.877	4.464.990.675	97,15	91,77	89,16	93,70	92,44	78%	-10%
22	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	350.600.000	385.000.000	300.000.000	283.750.000	500.000.000	334.130.604	306.126.376	288.731.626	274.686.278	473.613.968	95,30	79,51	96,24	96,81	94,72	15%	-18%
23	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	3.589.442.000	6.889.450.000	2.235.350.000	2.327.908.000	9.590.000.000	3.390.729.052	6.539.767.982	2.068.967.000	2.210.596.070	9.011.035.830	94,46	94,92	92,56	94,96	93,96	80%	-9%
24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	387.000.000	356.000.000	250.000.000	0	0	285.986.437	256.671.039	242.710.116	0	0	73,90	72,10	97,08	-	-	-19%	-8%
25	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	9.622.282.000	8.030.080.000	5.300.000.000	3.094.000.000	3.900.000.000	8.040.807.513	5.725.697.728	4.658.465.344	2.873.134.487	3.737.399.509	83,56	71,30	87,90	92,86	95,83	-15%	-32%
26	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.658.868.000	3.892.775.000	3.500.000.000	1.335.000.000	1.750.000.000	2.915.422.920	2.652.954.520	3.278.364.877	1.252.543.300	1.647.277.360	79,68	68,15	93,67	93,82	94,13	-9%	-19%
27	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	250.000.000	261.000.000	100.000.000	75.000.000	150.000.000	171.500.000	217.150.000	96.219.000	65.820.000	149.870.000	68,60	83,20	96,22	87,76	99,91	4%	-38%
28	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	1.398.956.000	2.409.800.000	1.010.000.000	842.500.000	940.000.000	1.233.994.095	2.064.759.238	932.732.954	623.887.000	829.791.100	88,21	85,68	92,35	74,05	88,28	0%	-14%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
29	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kedokteran/Laboratorium	25.000.000	30.000.000	3.000.000	0	0	2.250.000	8.800.000	3.000.000	0	0	9,00	29,33	100,00	-	-	-35%	113%
30	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip	120.000.000	120.000.000	100.000.000	90.000.000	150.000.000	118.400.000	108.230.000	98.499.000	84.690.000	138.452.000	98,67	90,19	98,50	94,10	92,30	10%	-18%
31	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	160.000.000	105.000.000	75.000.000	0	0	138.000.000	91.925.000	41.710.000	0	0	86,25	87,55	55,61	-	-	-31%	-44%
32	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	5.506.950.000	7.648.680.000	5.936.890.000	3.180.400.000	22.145.000.000	5.071.287.500	6.998.312.000	5.519.616.500	2.949.816.000	21.424.702.840	92,09	91,50	92,97	92,75	96,75	120%	-5%
33	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	1.300.000.000	1.007.095.000	510.350.000	190.000.000	390.000.000	1.177.195.000	884.385.650	464.271.000	97.260.000	357.230.000	90,55	87,82	90,97	51,19	91,60	-13%	-59%
34	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	590.000.000	610.000.000	100.000.000	0	0	478.569.550	426.059.200	84.593.200	0	0	81,11	69,85	84,59	-	-	-40%	-46%
35	Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia	485.948.000	460.000.000	500.000.000	178.125.000	50.000.000	450.109.250	333.104.780	397.538.700	164.742.000	21.500.000	92,62	72,41	79,51	92,49	43,00	-5%	-22%
36	Kegiatan Peningkatan Capaian Kinerja PNS	-	398.800.000	0	0	0	0	274.737.150	0	0	0	-	68,89	-	-	-	-	-
37	Kegiatan Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	-	0	0	4.848.169.000	5.205.000.000	0	0	0	4.019.372.798	3.979.979.612	-	-	-	82,90	76,46	13%	-69%
38	Kegiatan Pelayanan Keprotokolan Biro Umum	-	0	0	1.261.500.000	1.820.000.000	0	0	0	1.239.153.301	1.692.423.194	-	-	-	98,23	92,99	19%	-45%
39	Kegiatan Rapat Koordinasi	-	0	0	71.250.000	100.000.000	0	0	0	55.470.000	96.017.500	-	-	-	77,85	96,02	40%	-15%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realiasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Perencanaan Program Biro Umum																	
40	Kegiatan Penguatan Semangat Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	-	0	0	125.000.000	150.000.000	0	0	0	92.785.000	134.826.693	-	-	-	74,23	89,88	20%	45%
41	Kegiatan Pembuatan naskah dan himpunan sambutan/ makalah/ keynote speaker Gubernur Jawa Tengah	-	0	0	427.500.000	450.000.000	0	0	0	389.650.962	444.051.988	-	-	-	91,15	98,68	5%	-72%
42	Peningkatan Semangat Nilai-nilai Nasionalisme Masyarakat Jawa Tengah	-	0	0	275.000.000	330.000.000	0	0	0	206.621.750	311.454.829	-	-	-	75,14	94,38	20%	-94%
43	Kegiatan Pengelolaan barang milik daerah	-	0	0	380.000.000	400.000.000	0	0	0	316.214.912	303.674.445	-	-	-	83,21	75,92	5%	-66%
44	Kegiatan Pimpinan Daerah dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	-	0	0	1.900.000.000 0	2.880.000.000 0	0	0	0	1.884.968.692	2.872.534.102	-	-	-	99,21	99,74	5%	-40%
45	Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah	-	0	0	1.300.000.000 0	1.650.000.000 0	0	0	0	1.254.783.781	1.340.812.961	-	-	-	96,52	81,26	35%	-45%
46	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Perpustakaan	-	0	0	-	25.000.000	0	0	0		20.808.000	-	-	-		83,23	-	-



Selanjutnya secara rinci, capaian kinerja pelayanan di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

2.3.a. Capaian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

Capaian kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 48 OPD dan 35 Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang tugas Pemerintahan di 48 OPD dan 35 Kabupaten/Kota termasuk Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas bidang tugas pelaksanaan Pemerintahan desa di 35 Kabupaten/Kota (2013-2016).
- d. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tertib administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil di 35 Kabupaten/Kota (2013-2016).
- e. Peningkatan penyelesaian konflik pertanahan melalui fasilitasi konflik pertanahan yang terkait dengan fasilitas umum maupun Proyek Strategis Nasional.
- f. Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban melalui audiensi unjuk rasa di lingkungan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
- g. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas penataan wilayah di 35 Kabupaten/Kota melalui penataan batas dengan ditetapkannya 72 segmen batas daerah dan meraih penghargaan Terbaik I Fasilitator Penegasan Batas Daerah Tingkat Nasional Tahun 2014, penataan kode data administrasi wilayah, serta tersusunnya basis data rupabumi Jawa Tengah yang telah dimuat dalam Gazetir Nasional dan diakui secara internasional dengan bertambahnya 38 pulau di wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah.
- h. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Bupati/Walikota) di Jawa Tengah.
- i. Peningkatan tertib administrasi pelaksanaan tugas pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- j. Peningkatan kualitas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 dengan diraihnya Parasamya Purnakarya Nugraha pada tahun 2014 dan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha pada tahun 2015, 2016 dan 2018 untuk evaluasi dan peningkatan capaian kinerja pembangunan daerah.
- k. Peningkatan kualitas Laporan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Jawa Tengah Periode 2013 – 2018.

Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kerja sama antar lembaga pemerintah dan non pemerintah baik dalam dan luar negeri. Dalam kurun waktu tahun 2014-2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah

menandatangani 443 naskah kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam negeri dan 148 naskah kerja sama dengan pihak ketiga dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama *sister province* dengan 4 provinsi di luar negeri, yaitu Negara Bagian *Queensland* Australia, Provinsi Fujian China, Chung Cheong Buk Do Korea dan Siem Reap Kamboja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerja sama dengan 8 lembaga non pemerintah luar negeri (*International Non Governmental Organization*) yaitu *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa, *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa, *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan, *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan, *Swiss Contact (SC)* Swiss dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, *Konrad Adeneur Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

### 2.3.b. Capaian Kinerja Biro Hukum

Capaian kinerja Biro Hukum, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas rancangan produk hukum Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peningkatan kualitas kajian atas produk hukum Provinsi Jawa Tengah.
- c. Peningkatan fasilitasi penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peningkatan pemberian bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang terikat kerja sama dalam fasilitasi penanganan perkara masyarakat yang tidak mampu berperkara di lembaga peradilan.
- e. Peningkatan fasilitasi penyelesaian sengketa hukum terutama permasalahan sengketa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- f. Peningkatan fasilitasi dan pembinaan dalam kegiatan Aksi HAM Kabupaten/Kota dan kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- g. Peningkatan koordinasi dan penyusunan laporan Aksi HAM serta Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi Jawa Tengah.

- h. Peningkatan pelayanan informasi hukum secara cepat, mudah dan akurat serta *update*.
- i. Peningkatan sosialisasi produk hukum bagi ASN dan masyarakat di Jawa Tengah.
- j. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan produk hukum daerah Kabupaten/Kota melalui evaluasi dan fasilitasi.

#### 2.3.c. Capaian Kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat

Capaian kinerja Biro Kesejahteraan Rakyat, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui sinergitas pelaksanaan kebijakan pada seluruh Perangkat Daerah terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Koordinasi dan Fasilitasi penyusunan Perda Kesejahteraan Lansia dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2011 – 2018.
- c. Penyusunan rekomendasi/kebijakan yang berkaitan dengan pengurangan penempatan TKI asal Jawa Tengah pada sektor penatalaksana rumah tangga.
- d. Peningkatan upaya pembinaan keagamaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) guru pendidikan tingkat dasar dan menengah di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- e. Peningkatan koordinasi pembinaan bidang kebudayaan dan kesenian di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- f. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pendidikan.
- g. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kepemudaan dan olah raga.

#### 2.3.d. Capaian Kinerja Biro Perekonomian

Capaian kinerja Biro Perekonomian, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi BUMD, sosialisasi program PKBL-BUMN, KUR, KKPE, KUPS, Lembaga Keuangan Mikro, dan permodalan bagi UMKM di Jawa Tengah.
- b. Peningkatan pembinaan, monev BUMD, MP3I, promosi bidang penanaman modal dan UKM bidang pariwisata serta promosi produk unggulan.
- c. Peningkatan pengumpulan informasi IHT Cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan bidang cukai.
- d. Peningkatan pelaksanaan Rakor BUMD, Ekuinda, Kerajinan Daerah, dan Pemantauan Komoditas Strategis TPID, serta Koordinasi bidang Perekonomian.

- e. Peningkatan pelaksanaan Posko Terpadu Lebaran, Natal Tahun berjalan dan Tahun Baru Berikutnya.
- f. Peningkatan pelaksanaan RUPS dan kajian BUMD.

2.3.e. Capaian Kinerja Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam:

Capaian kinerja Biro Bina Produksi, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan pangan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang perikanan dan kelautan.
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang kehutanan.
- d. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup.
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas bidang energi dan sumber daya mineral.

2.3.f. Capaian Kinerja Biro Organisasi

Capaian kinerja Biro Organisasi, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Penataan kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
- b. Evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah di 35 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, selama lima tahun.
- c. Penataan kelembagaan non struktural Provinsi di Jawa Tengah.
- d. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Penyusunan Formasi PNS pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- e. Fasilitasi pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan penyusunan formasi PNS di 35 pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- f. Peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Provinsi Jawa Tengah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penetapan Kinerja (PK) Gubernur Jawa Tengah dan Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan RKT SKPD Provinsi Jawa Tengah selama lima tahun.
- g. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan IKU SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.
- h. Peningkatan fasilitasi pelaksanaan Sistem AKIP di 35 pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

- i. Peningkatan pengembangan budaya kerja aparatur di SKPD Provinsi Jawa Tengah dan terfasilitasinya pelaksanaan pengembangan budaya kerja di 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- j. Penyusunan Draft Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan terfasilitasinya penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- k. Penyusunan pedoman tata naskah dinas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan tata naskah dinas di 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
- l. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan SOP di 35 Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- m. Penyusunan Pola Hubungan Kerja di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan pola hubungan kerja di Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- n. Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) di Unit Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan fasilitasi penyusunan SPP di Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
- o. Pendampingan Sistem Manajemen Mutu (SMM) di Unit Pelayanan Publik (UPP) Provinsi Jawa Tengah.
- p. Sertifikasi ISO pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah.
- r. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.

#### 2.3.g. Capaian Kinerja Biro Umum

Capaian kinerja Biro Umum, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan rumah tangga pimpinan.
- b. Peningkatan penyelenggaraan ketatausahaan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- c. Peningkatan kualitas penyusunan analisis dan kebutuhan barang di lingkungan Setda Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Setda Prov. Jawa Tengah.
- e. Peningkatan pelayanan acara protokoler dan pelayanan tamu daerah.
- f. Peningkatan pelayanan bidang kehumasan dan publikasi pimpinan daerah.

#### 2.3.h. Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah:

Capaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Daerah, dalam kurun waktu Tahun 2013 – 2018, sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jateng pada 48 OPD maupun bantuan keuangan kepada 35 Kabupaten/Kota.
- b. Peningkatan pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan kepada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. Peningkatan kualitas pelaporan kegiatan pada OPD dan Kabupaten/Kota.
- d. Peningkatan kualitas LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2013-2018.
- e. Peningkatan pelayanan Pengadaan barang dan jasa pada 48 OPD, dengan terbentuknya Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh beberapa perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional. Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap rencana strategis dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018.

##### 2.4.1. Tantangan Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

###### 2.4.1.a. Tantangan Pengembangan Pelayanan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang semakin berkualitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan sebagai simpul pelayanan publik di daerah, sehingga menuntut peningkatan kapasitas Pemerintahan.
- 2) Meningkatnya konflik pertanahan sehingga menuntut adanya kebijakan dan penyelesaian yang tepat dan komprehensif.
- 3) Masih adanya konflik batas daerah dan permasalahan di wilayah perbatasan, sehingga memerlukan adanya penataan wilayah sesuai dengan kebutuhan lokal.
- 4) Semakin meningkatnya kompetisi antar daerah yang menuntut adanya inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 5) Masih terjadinya konflik pemilihan kepala daerah sehingga menuntut adanya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

- 6) Semakin terbatasnya sumber daya daerah sehingga menuntut peningkatan kerja sama daerah.

#### 2.4.1.b. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

- 1) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap adanya *law enforcerment*.
- 2) Meningkatnya harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dan bersih dari unsur KKN.
- 3) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan HAM.
- 4) Tuntutan terhadap pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang cepat, mudah dan akurat serta *update*.
- 5) Meningkatnya permasalahan hukum dari masyarakat tidak mampu yang sedang ber perkara di lembaga peradilan.
- 6) Tuntutan proses pengawasan dan pemantauan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas, efektif dan cepat.

#### 2.4.1.c. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Rakyat

- 1) Masih banyaknya penduduk miskin di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi antar stakeholder yang terkait.
- 2) Masih tingginya angka pengangguran di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan yang terintegrasi dan lintas sektoral secara tepat.
- 3) Belum optimalnya jaminan sosial tenaga kerja utamanya pada akses layanan kesehatan dan kepemilikan rumah layak huni dan belum optimalnya perlindungan tenaga kerja
- 4) Belum optimalnya upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dikarenakan permasalahan belum terpenuhinya sarana prasarana serta meratanya pendayagunaan dan kompetensi tenaga kesehatan.
- 5) Meningkatnya kerja sama Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima bantuan iur (PBI) yang ditanggung oleh Pemerintah.
- 6) Diterbitkannya regulasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai upaya tindak lanjut masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat untuk menekan munculnya penyakit-penyakit tidak menular yang membutuhkan biaya besar dalam pengobatannya, seperti kanker, Jantung, hipertensi, DM.
- 7) Semakin meningkatnya kasus korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak, sehingga membutuhkan perhatian untuk pengambilan kebijakan dan penanganan secara tepat dan terintegrasi.

- 8) Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan penanganan secara tepat dan terkoordinir agar menghasilkan kinerja yang optimal.
- 9) Meningkatnya tuntutan akan kerukunan umat beragama di Jawa Tengah, sehingga membutuhkan upaya koordinasi dan fasilitasi agar terwujudnya kerukunan umat beragama.
- 10) Menurunnya minat masyarakat dan generasi muda terhadap nilai-nilai budaya asli daerah, sehingga membutuhkan upaya peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang seni dan budaya.
- 11) Meningkatnya ekstensi masyarakat Jawa Tengah terhadap peran pemuda dalam mengisi pembangunan di Jawa Tengah.
- 12) Meningkatnya eksistensi masyarakat Jawa Tengah terhadap prestasi bidang Olah raga di tingkat nasional maupun internasional.
- 13) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perbaikan sarana prasarana ibadah, tempat pendidikan agama.
- 14) Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas fasilitasi kegiatan kebudayaan kesenian dan Olah raga.

#### 2.4.1.d. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian

- 1) Terbatasnya kemampuan Lembaga Keuangan Mikro Non Bank, Non Koperasi dan UMKM untuk memenuhi kebutuhan modal usaha maupun melakukan persiapan menuju berbadan hukum.
- 2) Lemahnya akses kepada lembaga permodalan dan promosi pemasaran serta manajemen usaha yang masih sederhana.
- 3) Meningkatnya jumlah pemudik ke Jawa Tengah dan adanya ruas jalan tol yang mengakibatkan bertambah nya pemudik menggunakan moda pribadi.
- 4) Lemahnya daya dukung sarana dan prasarana jalan alternatif masih kurang mendukung dalam angkutan lebaran.
- 5) Keterbatasan kewenangan Provinsi di bidang Perkeretaapian terkait reaktivasi Jalur Kereta Api.
- 6) Keterbatasan kewenangan Provinsi di bidang Udara terkait pengembangan Bandara di Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Jalur reaktivasi yang sudah beralih fungsi dan Pengadaan lahan.
- 8) Kurangnya sinergi program pengembangan pariwisata antar Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta stakeholder di bidang pariwisata.

#### 2.4.1.e. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

- 1) Tuntutan adanya peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka mensinergikan dan mengintegrasikan penyusunan kebijakan bidang



infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.

- 2) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energy sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.
- 3) Adanya tuntutan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi perangkat daerah bidang infrastruktur, lingkungan hidup, kehutanan dan energy sumber daya mineral, ketahanan pangan, kelautan, perikanan dan pertanian.
- 4) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, sehingga diperlukan peningkatan kinerja bidang pertanian melalui peningkatan produksi dan keanekaragaman pangan.
- 5) Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan energi, sehingga dibutuhkan peningkatan penghematan dan pengelolaan energi baru terbarukan.

#### 2.4.1.f. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

#### 2.4.1.g. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

- 1) Adanya tuntutan internasional untuk menerapkan *good governance* dan *clean government*.
- 2) Semakin meningkatnya tuntutan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- 3) Adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat.
- 4) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

#### 2.4.1.h. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Umum

- 1) Adanya tuntutan pelayanan bidang kerumahtanggaan dan keuangan setda yang optimal.
- 2) Tuntutan terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang memadai.
- 3) Kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan prima di bidang keprotokolan dan kehumasan.

#### 2.4.1.i. Tantangan Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah

- 1) Meningkatnya tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Masih rendahnya tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- 3) Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lingkup Setda.
- 4) Masih terdapat kegiatan Bantuan Keuangan kepada kab/kota yang pelaksanaannya terlambat maupun tidak dapat dilaksanakan/tidak selesai.

#### 2.4.2. Peluang Bagi Pengembangan Pelayanan di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

##### 2.4.2.a. Peluang Pengembangan Pelayanan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja sama

- 1) Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- 2) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

##### 2.4.2.b. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Hukum

- 1) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memiliki produk hukum daerah Provinsi Jawa Tengah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan lainnya, kepentingan umum, efektif dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan harapan masyarakat.
- 2) Kondisi dan situasi wilayah Jawa Tengah yang relatif stabil dan kondusif.
- 3) Tertib administrasi dalam penyusunan dan pembentukan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta dalam perlindungan hukum atas pengamanan barang milik daerah/aset.
- 4) Optimalisasi/pengembangan dan peningkatan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang sedang berperkara di lembaga peradilan.
- 5) Adanya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam menyusun produk hukum daerah yang sesuai dengan kewenangannya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 6) Koordinasi dan kerjasama dengan Instansi yang kompeten, baik internal SKPD maupun eksternal SKPD pengampu kewenangan yaitu Kabupaten/Kota dan pusat guna membentuk layanan dalam sistem JDIH yang terpadu.

##### 2.4.2.c. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Kesejahteraan Sosial

- 1) Pentingnya komitmen pemerintah dalam peningkatan SDM dilingkup biro karena tugas dan fungsi yang bermacam disiplin ilmu.
- 2) Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan agama di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Beragamnya budaya daerah yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Banyaknya ormas/lembaga/perkumpulan bidang kesenian, pemuda dan Olah raga yang ada di Jawa Tengah.
- 5) Tersedianya sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah, sesuai Undang-undang No. 23 kewenangan SMA/SMK menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah sehingga ditinjau dari sarana, prasarana penunjang dan SDM perlu dipikirkan dalam proses belajar mengajar .
- 6) Kesehatan dalam kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi masih tinggi dimana upaya-upaya untuk menekan kasusnya masih terus dilakukan, diantaranya dengan istilah yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Jateng gayeng nginceng wong meteng, diharapkan dapat menekan kasus AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi).
- 7) Persebaran tenaga medis dan non medis yang kurang merata dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani.
- 8) Sekolah-sekolah intuisi bagi penyandang disabilitas perlu dipikirkan sarana prasarana dan SDM pengajarnya, dimana perlu peran Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketrampilan dan kecerdasan mereka untuk ikut berperan serta dalam pembangunan
- 9) Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) belum optimal karena jumlah PMKS yang tidak sebanding dengan sasaran penanganan serta kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri.
- 10) Penanganan terintegrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota masih terus dilakukan untuk Basic Data Terpadu bagi masyarakat Penerima Bantuan Iur yang ditanggung Pemerintah dalam jaminan kesehatan nasional.
- 11) Penanggulangan bencana yang difokuskan pada upaya pengurangan resiko dan kerentanan bencana.
- 12) Belum optimalnya peluang bagi kegiatan produktif, lemahnya kemampuan SDM terutama pada kelompok muda dan anak dari keluarga miskin.

#### 2.4.2.d. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian

- 1) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan kemampuan SDM, Lembaga Keuangan Mikro, dan modal usaha.
- 2) Adanya komitmen pemerintah untuk melaksanakan peningkatan koordinasi dan fasilitasi guna mensinergikan kegiatan di Provinsi dengan kab/kota.

- 3) Adanya komitmen pemerintah untuk mendorong peningkatan berusaha dan bekerja, jumlah usaha kecil menengah serta menarik investor.
- 4) Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk mendorong kepada perusahaan daerah selalu meningkatkan pendapatannya.
- 5) Kompetitifnya pelaku usaha pada kegiatan – kegiatan yang dikelola oleh BUMD.
- 6) Adanya komitmen Pemerintah dalam mewujudkan angkutan aglomerasi Trans Jateng.
- 7) Adanya Komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi bersama stake holder terkait dalam pengembangan bandara di Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Reaktivasi Jalur Kereta Api.

#### 2.4.2.e. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Pelayanan Pengadaan barang/jasa yang lebih transparan dan akuntabel dilakukan oleh suatu lembaga secara mandiri.
- 2) Pengembangan dan pendayagunaan Sistem Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

#### 2.4.2.f. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya

- 1) Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan Jawa Tengah dapat berdikari di bidang pangan dan energi.
- 2) Tersedianya lahan pertanian yang potensial dan produktif untuk dikembangkan dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah berdikari di bidang pangan.
- 3) Adanya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 4) Adanya tuntutan global untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis system informasi yang handal.

#### 2.4.2.g. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Organisasi

- 1) Adanya kebijakan dan komitmen Gubernur untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersih dan jujur.
- 2) Adanya tuntutan global untuk mewujudkan adanya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik di semua lini Pemerintahan.

#### 2.4.2.h. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Umum

- 1) Tercapainya kondisi sarana dan prasarana gedung kantor Gubernur yang memadai.

- 2) Tercapainya pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan yang cepat, lancar dan bertanggungjawab.

2.4.2.i. Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Administrasi pembangunan Daerah

- 1) Komitmen dari pimpinan OPD dan Bupati/Walikota dalam mendukung mekanisme pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan secara efektif.
- 2) Tersedianya teknologi Informasi yang memadai dalam mendukung pengendalian dan pelaporan yang lebih optimal.